

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku penting pembangunan pariwisata yakni pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). Menurut Sarudin (2023) pengembangan wisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism-CBT*) merupakan pelibatan masyarakat dengan kepastian manfaat yang diperoleh masyarakat melalui upaya perencanaan dan pendampingan yang membela masyarakat lokal. Pemahaman mengenai pariwisata berbasis komunitas atau masyarakat seperti yang dijelaskan ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat dalam proses pengembangan kebijakan wisata ditempatkan dalam dua posisi sekaligus yaitu : pertama, sebagai objek yang memiliki hak untuk turut menentukan pengembangan pariwisata yang akan dilaksanakan, dan kedua, sebagai subjek yang harus mendapat manfaat dan keuntungan dalam pengembangan pariwisata.

Pengembangan daya tarik wisata berbasis masyarakat dapat berpengaruh dalam perubahan perekonomian masyarakat, khususnya daerah dengan memiliki potensi alam dan budaya, salah satunya yaitu berada di kota Bandar Lampung. Namun, potensi tersebut juga harus didukung oleh sarana lainnya seperti jasa usaha, transportasi, dan faktor kesiapan sumber daya manusia. Keterlibatan masyarakat justru sangat penting untuk keberlanjutan suatu daya tarik wisata, di Bandar Lampung yang melibatkan masyarakatnya dalam pengembangan daya tarik yaitu Lengkung Langit Dua, yang berada di Desa Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

Lengkung Langit Dua merupakan salah satu daya tarik wisata yang masih baru di Bandar Lampung, dibuka pada tahun 2021 dengan konsep nuansa alam yang sejuk dan pemandangan laut sebagai salah satu *spot* foto utama. Lengkung Langit Dua buka setiap hari senin sampai dengan hari minggu dan selalu ramai pengunjung di setiap akhir pekan, rata-rata wisatawan yang datang berasal dari luar kota yang ingin berlibur santai menikmati pantai dan kemudian singgah ke Lengkung Langit Dua. Sebelum diresmikan, daya tarik wisata ini sudah buka di

daerah kelurahan Pinang Jaya, kecamatan Kemiling, kota Bandar Lampung, yaitu Lengkung Langit Satu dengan *view* perkotaan.

Pemberdayaan masyarakat di daya tarik wisata Lengkung Langit Dua memiliki peluang untuk menggerakkan potensi dan dinamika masyarakat, terdapat partisipasi masyarakat dalam pelaksana pengembangan destinasi yaitu menjadi tenaga kerja, yang di dalamnya terdapat tim pemasaran, oprator dan lain-lain, serta ikut dalam pengelolaan parkir dan beberapa wahana dengan tarif yang telah ditentukan. Namun, hal tersebut dapat berdampak pada perubahan pendapatan masyarakat lokal. Strategi pengembangan *Community Based Tourism* dijabarkan dalam aspek manajemen pengelolaan destinasi wisata, aspek sosial ekonomi, dan aspek budaya yang dilakukan melalui penilaian dan kesiapan baik persepsi, partisipasi masyarakat, dan keinginan masyarakat terhadap pengembangan daya tarik wisata.

Pemberdayaan masyarakat dalam dunia perjalanan wisata sangat berkaitan akan kerjasama dengan pemangku kepentingan berupa jasa perjalanan wisata yang berkualitas berupa tour planer, tour guide, wirusaha, dan marketing. Melalui pengembangan pengetahuan selama di dunia akademik, sumber daya yang dihasilkan pun harapanya dapat dijadikan pedoman selama berada di lapangan. Hal tersebut akan membentuk suatu daya tarik wisata yang terberdaya dan menjadi wisata yang berkelanjutan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan “Pemberdayaan Masyarakat di Daya Tarik Wisata Lengkung Langit Dua.”

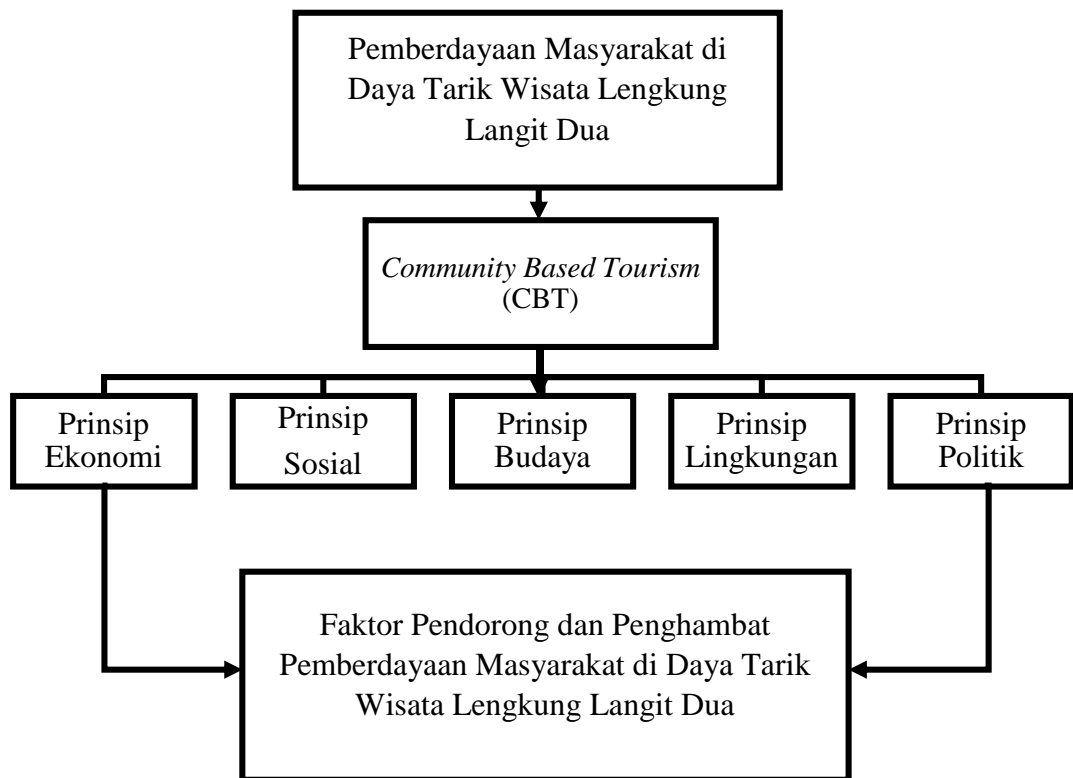
## **1.2 Tujuan**

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah :

1. Mendeskripsikan daya tarik wisata Lengkung Langit Dua.
2. Mendeskripsikan bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat di daya tarik wisata Lengkung Langit Dua.

### 1.3 Kerangka Pemikiran

Lengkung Langit Dua merupakan objek wisata buatan, dengan mengung konsep wisata alam. Hampir 70% area Lengkung Langit Dua masih dipenuhi pepohonan, daya tarik wisata ini memiliki salah satu visi yang bertujuan memberdayakan masyarakat lokal dan hal tersebut tertuang dalam prinsip CBT menurut Suansri (2003) di mana CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya dalam komunitas. CBT merupakan alat bagi pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan. Kerangka pemikiran mengenai Pemberdayaan Masyarakat di Daya Tarik Wisata lengkung Langit Dua disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

#### **1.4 Kontribusi**

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Politeknik Negeri Lampung

Sebagai sumber informasi dan referensi bacaan untuk kebutuhan akademisi dalam bidang ini.

2. Daya Tarik Wisata Lengkung Langit Dua

Sebagai sumber referensi tambahan Lengkung Langit dalam pemberdayaan masyarakat di daya tarik wisata Lengkung Langit Dua.

3. Bagi Pembaca

Laporan tugas akhir ini dapat menjadi referensi dan pengetahuan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat di daya tarik wisata Lengkung Langit Dua.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Community Based Tourism (CBT)*

*Community Based Tourism (CBT)* adalah kegiatan pariwisata, yang dimiliki dan dioperasikan oleh masyarakat, dan dikelola atau dikoordinasikan pada tingkat masyarakat yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui dukungan mata pencaharian yang berkelanjutan dan melindungi nilai tradisi sosial budaya dan sumber daya warisan alam dan budaya (ASEAN, 2016). Sedangkan menurut Nurdin (2016) penerapan pariwisata berbasis masyarakat atau CBT merupakan suatu pendekatan pembangunan pariwisata dengan perencanaan yang partisipatif. Definisi CBT yaitu: model pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal dengan memberi kesempatan dalam mengelola dan membangun pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki keterkaitan dengan industri atau usaha pariwisata, sehingga distribusi keuntungan merata kepada komunitas di pedesaan (Nurdin, 2016). Pelibatan tersebut dalam bentuk memberikan kesempatan (akses) dalam manajemen dan pembangunan pariwisata yang berujung pada pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam pembagian keuntungan dari kegiatan pariwisata (Nurdin, 2016).

CBT dapat didefinisikan sebagai pariwisata yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat dan dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, CBT adalah partisipasi lokal, dan menyerahkan kendali kepada masyarakat akan menghasilkan lebih banyak manfaat untuk mata pencaharian (Bagus & Ni Putu, 2019). Menurut Yudha (2019) CBT biasa juga disebut sebagai pariwisata berbasis masyarakat. Secara konseptual, prinsip dasar CBT adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga manfaat kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Suansri (2003) CBT adalah pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan, sosial, dan budaya, diatur dan dimiliki oleh komunitas, untuk komunitas. Teori tersebut sejalan dengan pemikiran Anstrand (2006) yang mendefinisikan (CBT) sebagai pariwisata yang memperhitungkan dan

menempatkan keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya, diatur dan dimiliki oleh komunitas, untuk komunitas. Namun, Anstrand melihat CBT bukan dari aspek ekonomi terlebih dahulu melainkan aspek pengembangan kapasitas komunitas dan lingkungan, sementara aspek ekonomi menjadi *'induced impact'* dari aspek sosial, budaya dan lingkungan.

Suansri (2003) menguatkan definisi CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya dalam komunitas. Dengan kata lain CBT merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan untuk memunculkan tools berpandangan baru dalam pembangunan pariwisata (Suganda, 2018).

Menurut UNEP dan WTO dalam Wiwin (2018), prinsip dasar CBT adalah sebagai berikut : (1) mengakui, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata, (2) mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek, (3) mengembangkan kebanggaan komunitas, (4) mengembangkan kualitas hidup komunitas, (5) menjamin keberlanjutan lingkungan, (6) mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal, (7) membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas, (8) menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia, (9) mendistribusikan keuntungan secara adil kepada anggota komunitas, dan (10) berperan dalam menentukan prosentase pendapatan (pendistribusian pendapatan) dalam proyek-proyek yang ada di komunitas.

## **2.1 Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Hamid (2018) Pemberdayaan masyarakat, dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Pada hakekatnya, pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditujukan pada individual, tetapi juga secara berkelompok, sebagai bagian dari aktualisasi eksistensi manusia (Hamid, 2018).

Dalam pengembangannya, Suansri (2003) menyebutkan terdapat lima prinsip yang merupakan aspek utama pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata, yaitu :

1. Prinsip Ekonomi

Berindikator timbulnya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan timbulnya pendapatan masyarakat lokal.

2. Prinsip Sosial

Berindikator terdapat peningkatan kualitas hidup, adanya peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki perempuan, generasi muda dan tua dan terdapat mekanisme penguatan organisasi komunitas.

3. Prinsip Budaya

Berindikator mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, mendorong berkembangnya pertukaran budaya dan adanya budaya pembangunan yang melekat erat dalam budaya lokal.

4. Prinsip Lingkungan

Berindikator pengembangan *carrying capacity* area, terdapat sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan dan adanya keperdulian tentang pentingnya konservasi.

5. Prinsip Politik

Berindikator terdapat upaya peningkatan partisipasi dari penduduk lokal, terdapat upaya untuk meningkatkan kekuasaan komunitas yang lebih luas dan terdapat mekanisme yang menjamin hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA (sumber daya alam).

Kelima prinsip tersebut merupakan wujud terlaksananya pariwisata yang berkelanjutan. Menurut Bagus & Ni Putu (2019), pariwisata berkelanjutan adalah pemenuhan kebutuhan perempuan dan destinasi pariwisata dalam upaya menyelamatkan dan memberikan peluang untuk menjadi lebih menarik lagi di masa depan. Hal ini sebagai pertimbangan sebagai ajakan dari pemerintah agar segala sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan di masa mendatang untuk kepentingan ekonomi, sosial dan keindahan yang dapat dijadikan daya tarik

dengan tetap menjaga keutuhan keanekaragaman budaya yang didukung oleh sistem kehidupan.

## 2.2 Daya Tarik Wisata

Dalam UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, daya tarik wisata (DTW) adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Daya tarik wisata merupakan fokus utama penggerak pariwisata di sebuah destinasi, dalam arti, daya tarik wisata adalah penggerak utama yang memotivasi wisatawan mengunjungi suatu tempat (Ismayanti, 2020). Sedangkan menurut Ningsih & Wahyuhana (2022) daya tarik wisata diartikan sebagai keunikan, keindahan, dan keanekaragaman kekayaan alam dan buatan yang dijadikan sebagai tujuan kunjungan wisatawan. Adapun daya tarik wisata tersebut berupa produk-produk wisata meliputi atraksi, amenities dan aksesibilitas objek wisata.

Menurut Basiya dan Rozak (2019), daya tarik tempat tujuan wisata merupakan motivasi utama bagi wisatawan untuk melakukan kunjungan wisata. Menurut mereka destinasi wisata dikelompokkan menjadi lima daya tarik, yaitu:

1. Daya tarik wisata alam (*natural attraction*) yang meliputi pemandangan alam daratan, pemandangan alam lautan, pantai, iklim atau cuaca.
2. Daya tarik wisata berupa arsitektur bangunan (*building attraction*) yang meliputi bangunan dan arsitektur bersejarah, bangunan dan arsitektur modern, arkeologi.
3. Daya tarik wisata yang dikelola khusus (*managed visitor attractions*), yang meliputi tempat peninggalan kawasan industri seperti yang ada di Inggris, *Theme Park* di Amerika, Darling Harbour di Australia.
4. Daya tarik wisata budaya (*cultural attraction*) yang meliputi teater, museum, tempat bersejarah, adat-istiadat, tempat-tempat religius, peristiwa-peristiwa khusus seperti festival dan drama bersejarah (*pageants*), dan heritage seperti warisan peninggalan budaya
5. Daya tarik wisata sosial seperti gaya hidup penduduk di tempat tujuan wisata.